

ANALISIS SEBARAN KEMISKINAN DAN FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI KABUPATEN LEBAK

Arief Rahman Susila

Universitas Terbuka

ariefrs@ut.ac.id

Abstract: *The problem of this study comes from the current issues related to the poverty, unemployment, inadequate quality of public services and the gap between regions due to the implementation of decentralization and regional autonomy. Structural imbalance is one of the major factors which influence the gap between the province and the new districts due to the economic activity which rely on specific areas such as the primary sector and the traditional agriculture; the effect of resource limitations on the rates of unemployment and poverty; the impact of minimum access to health facilities and education on human development index; the impact of insufficient infrastructure due to insufficient budgetary allocation on the quality of infrastructure. Some important efforts are undertaken to raise the economic growth rate which in turn to improve the welfare and the economy. The study aims to (1) analyze the pattern of spatial distribution of poverty in Lebak, (2) analyze the local government policies for poverty alleviation. Descriptive of visual-spatial analysis, and descriptive analysis are undertaken. The results shows that the population distribution and the poverty density tend to form clustered patterns (poverty pockets). This study suggest to align the pockets of poverty to the local communities through the regional policies undertaken by the government.*

Keywords: *Poverty, the poverty distribution, regional policies, Lebak District, pocket of poverty*

Abstrak: *Pada saat ini permasalahan utama yang harus dihadapi akibat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah mengenai isu kemiskinan, pengangguran, rendahnya mutu pelayanan publik dan kesenjangan pembangunan antardaerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan terjadi di provinsi dan kabupaten kota yang baru diantaranya adalah kesenjangan struktural akibat aktivitas perekonomian yang terlalu bertumpu pada sektor-sektor tertentu (biasanya sektor primer; pertanian tradisional), keterbatasan sumber daya yang berimplikasi pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berdampak pada indeks pembangunan manusia serta jumlah dan kualitas infrastruktur yang buruk karena tidak ditunjang oleh alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pemeliharaan. Pembangunan secara umum dapat diupayakan melalui kenaikan laju pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain tingginya laju pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada perbaikan kesejahteraan dan perekonomian secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pola spasial sebaran kemiskinan di Kabupaten Lebak, (2) Menganalisis kebijakan pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu: GIS (Geographic Information System), dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pemetaan terlihat bahwa sebaran penduduk kemiskinan dan kepadatan penduduk miskin cenderung membentuk pola mengelompok (kantong kemiskinan). Dengan terlihatnya kantong kemiskinan, maka diharapkan pemerintah mampu membuat suatu kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal.*

Kata kunci: *Kemiskinan, persebaran kemiskinan, kebijakan pengentasan kemiskinan, Kabupaten Lebak*

PENDAHULUAN

Pada saat ini permasalahan utama yang harus dihadapi akibat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah mengenai isu kemiskinan, pengangguran, rendahnya mutu pelayanan publik dan kesenjangan antardaerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan terjadi di provinsi dan kabupaten kota yang baru diantaranya adalah kesenjangan struktural akibat aktivitas perekonomian yang terlalu bertumpu pada sektor-sektor tertentu (biasanya sektor primer; pertanian tradisional), keterbatasan sumber daya yang berimplikasi pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berdampak pada indeks pembangunan manusia serta jumlah dan kualitas infrastruktur yang buruk karena tidak ditunjang oleh alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pemeliharaan (Rusdiyanto, 2007).

Berkaitan dengan kondisi demografi Kabupaten Lebak adalah mengenai proporsi penduduk miskin yang masih menunjukkan angka tinggi. Besarnya angka kemiskinan yang harus menjadi perhatian penting dalam pembangunan. Luasnya wilayah dan sangat beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Lebak menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing. Namun, adanya latar belakang demografi, geografi, infrastruktur dan ekonomi yang tidak sama, serta kapasitas sumberdaya yang berbeda, maka salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah keberagaman daerah dalam hal kinerja pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Perbedaan kinerja selanjutnya akan menyebabkan kesenjangan antardaerah, timbulnya konflik dan kemungkinan disintegrasi bangsa.

Dalam RPJM Provinsi Banten tahun 2007-2012 salah satu program prioritas yaitu

penanggulangan kemiskinan, untuk wilayah yang ada di Banten Selatan (Lebak dan Pandeglang) lebih besar persentase kemiskinan dari total persentase kemiskinan Provinsi Banten. Kabupaten Lebak semenjak awal krisis ekonomi sampai dengan tahun 2001 yang merupakan awal terbentuknya provinsi Banten memiliki persentase kemiskinan yang tinggi di antara kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Begitu juga dengan Kabupaten Pandeglang semenjak krisis sampai otonomi daerah tingkat kemiskinan cenderung perubahan tiap tahun tidak terlalu banyak berubah, sehingga dapat dikatakan berlakunya otonomi daerah belum menunjukkan arah yang semakin membaik bagi Banten Selatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Banten Utara (Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon) presentase kemiskinan berada dibawah rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Banten kecuali Kabupaten Serang masih berada di atas rata-rata provinsi Banten, sedangkan yang perkembangannya relatif lebih maju, persentase penduduk miskin relatif lebih rendah terutama bagi Kota Cilegon.

Pertumbuhan ekonomi harus didorong untuk mencapai kesejahteraan penduduk serta mengurangi kesenjangan yang terjadi antara Kabupaten Lebak dengan wilayah sekitarnya terutama wilayah Jabotabek dan wilayah Banten bagian utara. Kabupaten Lebak sampai saat ini merupakan wilayah yang paling terbelakang diantara kabupaten dan kota di Propinsi Banten. Di samping itu, masih ada sekitar 40 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kondisi kemiskinan yang terjadi pada desa di wilayah Kabupaten Lebak sudah dalam kondisi sangat kompleks, dengan karakteristik yang berbeda dengan wilayah lain. Fokus penanganan masalah kemiskinan harus menjadi perhatian dari pemerintah. Karena sebab dan ciri kemiskinan di Kabupaten Lebak tidak sama antar satu daerah dengan daerah lainnya maka dalam usaha penanggulangan kemiskinan kemiskinan perlu digali lebih dahulu untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab kemiskinan didaerah tersebut. Berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut sejumlah

program selama ini telah dilakukan pemerintah terutama didasari oleh prospektif ekonomi masyarakat setempat.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana pola spasial sebaran kemiskinan di Kabupaten Lebak?
- Apakah kebijakan pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan sudah melihat aspek kewilayahan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Lebak. Data yang diperlukan dalam penelitian ini relatif banyak yang bersifat sekunder terdiri dari data sosial. Selain itu, dibutuhkan data spasial seperti peta administrasi Kabupaten Lebak. Jenis data yang ketiga adalah data kelembagaan. Data-data yang disebutkan di atas akan diperoleh dari BPS Propinsi Banten, BPS Propinsi Jawa Barat, Pemda Propinsi Banten, BPS Pusat, serta instansi lain yang terkait. Data yang digunakan adalah data PODES yang terdiri dari 3 titik tahun yaitu tahun 2000, 2003, 2006.

Indeks Geary digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian ini. Indeks Geary digunakan untuk melihat otokorelasi dari ukuran spasial. Rumus umum dari Indeks Geary adalah (Arlinghaus, 1996):

$$C = \frac{(N-1) \sum_i \sum_j W_{ij} (X_i - X_j)^2}{2W \sum_i (X_i - \bar{X})^2} \quad (1)$$

Dalam penentuan hubungan spasial yang ada dalam Indeks Geary ini didasarkan pada hipotesis pembobotan sebagai berikut:

- Jika Indeks (I) mendekati 0 positif (+), bisa dikatakan indeks bersifat mengelompok (*cluster*).
- Jika Indeks (I) mendekati 2 negatif (-), bisa dikatakan indeks bersifat menyebar atau merata.
- Jika Indeks (I) mendekati 1, maka Indeks tersebut bersifat random.

Pendekatan lain yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini

adalah dengan Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System/GIS) yang selanjutnya akan disebut SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya.

Dalam analisis ini dimaksudkan untuk melihat pola sebaran kemiskinan yang ada di Kabupaten Lebak, untuk memperkuat hasil dari analisis dalam Indeks Geary dan Moran. Setelah diketahui hasil analisis visual untuk variabel jumlah penduduk miskin dan tingkat kepadatan penduduk miskin, langkah selanjutnya adalah melihat prioritas desa dengan jumlah penduduk miskin dan tingkat kepadatan penduduk miskin tinggi. Penentuan prioritas ini didasarkan pada matriks berikut ini:

Tingkat Kepadatan Penduduk Miskin

KELAS	RENDAH (K 1)	SEDANG (K 2)	TINGGI (K 3)
	SEDIKIT (J 1)	J1 K1 1	J1 K2 2
SEDANG (J 2)	J2 K1 4	J2 K2 5	J2 K3 6
BANYAK (J 3)	J3 K1 7	J3 K2 8	J3 K3 9

Keterangan :

-  : Prioritas I (J3 K3)
-  : Prioritas II (J2 K5, J2 K3, J3 K2)
-  : Prioritas III (J1 K2, J1 K3, J2 K1, J3 K1)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Geary

Dalam penghitungan Indeks Geary ini terlebih dahulu harus dicari Matriks Kontiguitas (Matriks Wd). Matriks Wd yang digunakan adalah matriks yang sudah distandarisasi. Variabel yang digunakan adalah variabel jumlah penduduk miskin (%) dan kepadatan penduduk (jiwa/km²). Hasil perhitungan untuk Indeks Geary dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Indeks Geary Tahun 2000, 2003, dan 2006

Tahun	Variabel Yang Diamati	
	Jumlah Penduduk Miskin (%)	Tingkat Kepadatan Penduduk Miskin (jiwa/km ²)
2000	0.030953	0.078466
2003	0.053743	0.129028
2006	0.053491	0.12609

Sumber: Analisis Data

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk Indeks Geary pada Tabel 5.1. terlihat bahwa variabel sebaran penduduk miskin di Kabupaten Lebak pada tahun 2000 cenderung bersifat *cluster/berkelompok*, dengan nilai indeks mendekati 0 positif (+) atau dikatakan bahwa nilai indeks bersifat *spatial autocorrelation positive*. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2003 dan 2006. Nilai indeks mempunyai sifat mengelompok (*cluster*) karena nilainya yang mendekati 0 positif.

Sedangkan untuk variabel tingkat kepadatan penduduk miskin cenderung bersifat *cluster/berkelompok* dengan berpusat pada ibukota kabupaten, dengan nilai Indeks mendekati 0 positif (+) atau dikatakan bahwa nilai indeks bersifat *spatial autocorrelation positive*. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2003 dan 2006. Nilai indeks mempunyai sifat mengelompok (*cluster*) karena nilainya yang mendekati 0 positif (+).

Analisis Visual Spasial Deskriptif

Dalam analisis ini dimaksudkan untuk melihat pola sebaran kemiskinan yang ada di Kabupaten Lebak, untuk memperkuat hasil dari analisis dalam Indeks Geary. Setelah diketahui hasil analisis visual untuk variabel jumlah penduduk miskin dan tingkat kepadatan penduduk miskin, langkah selanjutnya adalah melihat prioritas desa dengan jumlah penduduk miskin dan tingkat kepadatan penduduk miskin tinggi.

Hasil overlay penggolongan kategori pembagian kelas kemiskinan desa berdasarkan

jumlah penduduk miskin dan kepadatan penduduk miskin tahun 2000, 2003, dan 2006 di semua wilayah Kabupaten Lebak. Jenis kantong kemiskinan yang terjadi pada tahun 2000 adalah kantong kemiskinan dengan sifat Daerah Kumuh Perkotaan (*Urban Slum*). Hal ini bisa dilihat dari letak kantong kemiskinan yang sangat dekat dengan ibukota Kabupaten yaitu Rangkasbitung. Daerah Kumuh Perkotaan ini adalah tipe kantong kemiskinan yang muncul karena adanya pergerakan dari kaum migran. Klasifikasi kategori untuk tahun 2000 ditunjukkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Desa di Kabupaten Lebak Berdasarkan Klasifikasi Kelas Tahun 2000

Kategori	Jumlah Desa	%
1 (J1 K1)	133	44.33
2 (J1 K2)	0	0.00
3 (J1 K3)	0	0.00
4 (J2 K1)	154	51.33
5 (J2 K2)	3	1.00
6 (J2 K3)	0	0.00
7 (J3 K1)	7	2.33
8 (J3 K2)	2	0.67
9 (J3 K3)	1	0.33
Total	300	100.00

Sumber : Analisis Data

Dari hasil klasifikasi berdasarkan kategori struktur kelas desa di Kabupaten Lebak yang ditampilkan pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa wilayah yang paling dominan untuk tahun 2000 ada pada kategori 4 (J2 K1), dengan jumlah desa sebesar 154 (sekitar 51,33%). Disusul oleh desa dengan kategori 1 (J1 K1) dengan jumlah desa sebanyak 133 (sekitar 44,33%). Kategori 8 (J3K2) ada 2 desa, yaitu Desa Muara ciujung Timur dan Cijoro Lebak. Sedangkan kategori paling parah yaitu kategori 9 (J9 K9) terdapat 1 desa (0,33%), yaitu desa Muara Ciujung Barat. Pada tahun 2000 ini dominasi wilayah desa dengan kategori 4 tersebut menunjukkan bahwa secara umum desa yang ada di Kabupaten lebak mempunyai sifat jumlah penduduk miskin sedang dengan tingkat kepadatan penduduk rendah.

Selanjutnya wilayah yang paling dominan untuk tahun 2003 ada pada kategori 4 (J2 K1), dengan jumlah desa sebesar 149 (sekitar 49,67%). Dominasi wilayah desa dengan kategori 4 tersebut menunjukkan bahwa secara umum desa yang ada di Kabupaten Lebak

mempunyai sifat jumlah penduduk miskin sedang dengan tingkat kepadatan penduduk rendah.

Untuk tahun 2003, kantong kemiskinan yang terbentuk mempunyai sifat Daerah Terpencil (*Remote Area*). Daerah yang jauh dari titik pertumbuhan yang hampir tidak/belum tersentuh oleh pembangunan. Sebab-sebab mengapa belum tersentuh oleh pembangunan bisa karena letak geografis yang menyulitkan, atau karena belum ditemui potensi ekonomi yang bisa dikembangkan sehingga kurang menarik bagi investasi. Sama seperti tahun 2000, pada tahun 2003 juga terdapat daerah yang memang secara sosial budaya tidak boleh dimasuki oleh dunia luar, yaitu desa dari kaum Suku Baduy. Sehingga muncul adanya kantong kemiskinan.

Hasil *overlay* penggolongan kategori pembagian kelas kemiskinan desa berdasarkan jumlah penduduk miskin dan kepadatan penduduk miskin tahun 2003, di semua wilayah Kabupaten Lebak. ditunjukkan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Desa di Kabupaten Lebak Berdasarkan Klasifikasi Kelas Tahun 2003.

Kategori	Jumlah Desa	%
1 (J1 K1)	140	46.67
2 (J1 K2)	0	0.00
3 (J1 K3)	1	0.33
4 (J2 K1)	149	49.67
5 (J2 K2)	1	0.33
6 (J2 K3)	0	0.00
7 (J3 K1)	9	3.00
8 (J3 K2)	0	0.00
9 (J3 K3)	0	0.00
Total	Total	300

Sumber: Analisis Data

Selanjutnya, untuk Hasil *overlay* penggolongan kategori pembagian kelas kemiskinan desa berdasarkan jumlah penduduk miskin dan kepadatan penduduk miskin tahun 2006, di semua wilayah Kabupaten Lebak. ditunjukkan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Desa di Kabupaten Lebak Berdasarkan Klasifikasi Kelas Tahun 2006.

Kategori	Jumlah Desa	%
1 (J1 K1)	151	50.33
2 (J1 K2)	2	0.67
3 (J1 K3)	0	0.00
4 (J2 K1)	125	41.67
5 (J2 K2)	6	2.00
6 (J2 K3)	0	0.00
7 (J3 K1)	13	4.33
8 (J3 K2)	3	1.00
9 (J3 K3)	0	0.00
Total	Total	300

Sumber: Analisis Data

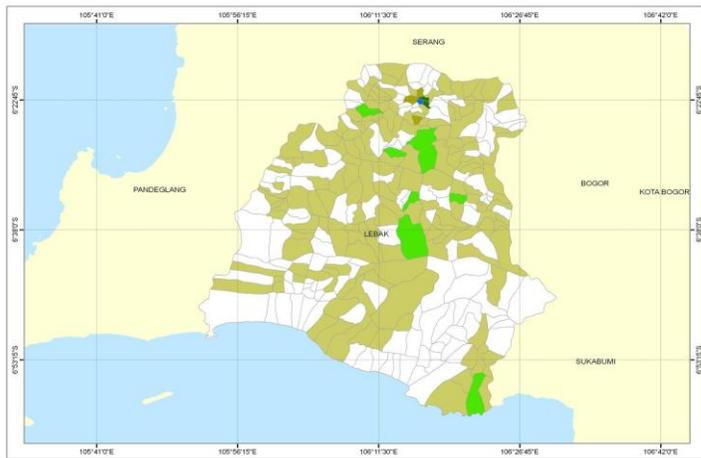
Pada tahun 2006 ini muncul 2 tipe kantong kemiskinan. Pertama, kantong kemiskinan dengan sifat Daerah Kumuh Perkotaan (*Urban Slum*). Yaitu kantong kemiskinan yang terbentuk karena kaum migran. Tipologi kemiskinan daerah perkotaan, golongan miskin biasanya menunjuk pada rumah tangga yang mengandalkan pendapatan dari buruh dan sektor informal. Khususnya sektor informal sangat bervariasi seperti buruh kasar, pedagang yang tidak bermodal atau bermodal kecil. Kebanyakan orang miskin melakukan pekerjaan ganda. Misalnya daerah perdesaan seseorang sebagai petani sawah dapat saja menjadi buruh tani, tukang dan buruh lainnya. Di kalangan nelayan, seorang buruh nelayan dapat saja merangkap pekerjaan sebagai tukang atau buruh angkat. Demikian juga daerah perkotaan, seorang pegawai rendahan merangkap sebagai tukang ojek atau buruh serabutan. Kedua, Daerah Pedesaan (*Rural Area*), yaitu daerah yang secara relatif daerah pedesaan lebih miskin dari daerah perkotaan. Lebih spesifik lagi, yang dimaksud dengan daerah pedesaan di sini adalah daerah yang basis perekonomiannya dari sektor pertanian. Hampir pasti kemiskinan dapat dijumpai pada kalangan petani berlahan sempit, pekerja tani atau petani tak berlahan, dan sejumlah pedagang-pedagang kecil di pedesaan.

Pada daerah yang berbasis pertanian sawah, golongan miskin biasanya menunjuk pada rumah tangga yang mengandalkan pendapatannya dari pekerjaan buruh tani. Ini terjadi karena tidak memiliki lahan sendiri atau lahan sempit seperti petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian. Pada tipologi yang berbasis nelayan, golongan miskin menunjuk pada rumah tangga buruh

nelayan yang tidak memiliki sarana penangkap ikan yang lengkap. Biasanya buruh nelayan hanya memiliki sampan saja atau perahu tidak bermotor.

Secara lebih jelas mengenai penggambaran klasifikasi pembagian penanganan kemiskinan desa yang ada di Kabupaten Lebak ditunjukkan pada Gambar 1 berikut:

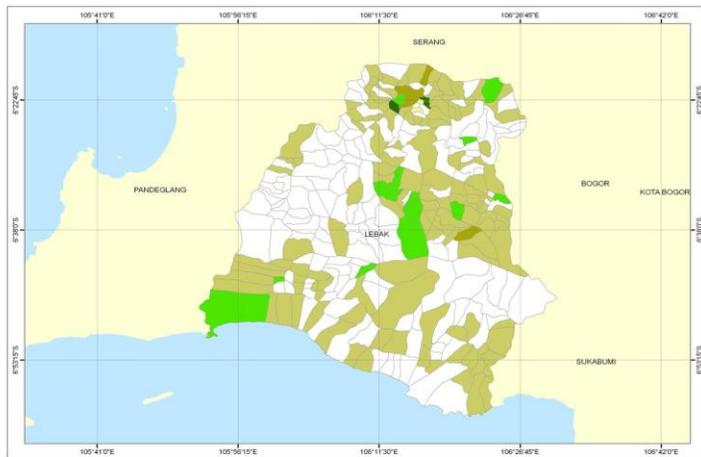
Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia 2013, Antara Peluang dan Tantangan



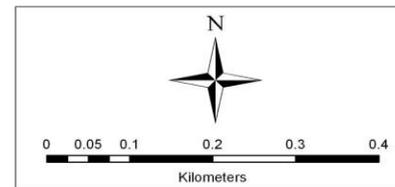
Tahun 2000



Tahun 2003



Tahun 2006



Gambar 1. Peta Klasifikasi Sebaran Jumlah Penduduk Miskin dan Kepadatan Penduduk Miskin

Gambaran Kebijakan Pemerintah Untuk Pengentasan Kemiskinan

Kabupaten Lebak adalah satu di antara 2 Kabupaten di Wilayah Selatan Propinsi Banten yang tertinggal. Salah satu isu pokok dalam perjuangan pembentukan Propinsi Banten dengan memisahkan diri dari propinsi Jawa Barat merupakan upaya pembebasan dari kemiskinan, ketertinggalan dan ketimpangan yang terjadi diantara Kabupaten/Kota (RTRW Lebak, 2008). Sehingga dapat dikatakan bahwa penanganan masalah kemiskinan selalu menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Lahirnya Propinsi Banten bersamaan dengan mulai dilaksanakannya otonomi daerah memberikan peluang bagi Kabupaten Lebak untuk segera berbenah diri dan bangkit dari ketertinggalan dengan membangun daerahnya sendiri secara lebih berhasil guna dan berdayaguna sesuai dengan kondisi, potensi dan peluang yang dimiliki. Dengan menselaraskan aspirasi dan kehendak stakeholders di Kabupaten Lebak dalam kerangka koordinasi yang harmonis dengan Pemerintah Propinsi Banten.

Berkaitan dengan kondisi demografi Kabupaten Lebak adalah mengenai proporsi penduduk miskin yang masih menunjukkan angka tinggi. Pada tahun 2005 tercatat proporsi penduduk miskin dari total keluarga di Kabupaten Lebak sebesar 25% dengan jumlah keluarga miskin tahun 2005 sebanyak 146.490 KK, dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2006 (RPJPD Lebak 2008-2028). Besarnya angka kemiskinan yang harus menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun mendatang. Luasnya wilayah dan sangat beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Lebak menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Oleh karena itu, masalah kemiskinan menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan

adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan penting yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antar daerah adalah bukan untuk pemeratakan pembangunan fisik di setiap daerah, tetapi yang paling utama adalah pengurangan kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antar daerah

Berdasarkan intensitas dan frekuensi segala bentuk kegiatan yang terjadi saat ini, di Kabupaten Lebak bagian Utara mempunyai intensitas kegiatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian Tengah maupun Selatan. Oleh karena itu dengan didasari pertimbangan intensitas kegiatan, Kabupaten Lebak didalam pengembangan struktur pemanfaatan ruangnya terbagi dalam 2 (dua) Wilayah Pengembangan yaitu Wilayah Pengembangan Utama dan Wilayah Pengembangan Penunjang.

Wilayah Pengembangan Utama

Wilayah Pengembangan Utama memiliki aglomerasi kegiatan perkotaan dengan peran sebagai pusat dan pendorong pertumbuhan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan karena kegiatan perekonomian yang ada di wilayah ini terkait dengan sistem perekonomian regional dan memiliki basis ekonomi (keunggulan komparatif) untuk membangkitkan perekonomian daerah tersebut beserta daerah sekitarnya.

Wilayah ini memiliki fungsi sebagai penggerak utama roda perekonomian Kabupaten Lebak, dimana dengan fungsi tersebut diharapkan akan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan wilayah sekitarnya (trickle down effect). Selain itu dengan melihat faktor lokasi dan kelengkapan sarana maupun prasarannya telah menjadikan wilayah ini sebagai pusat koleksi dan distribusi bagi wilayah

belakangnya serta menjadikan pintu gerbang interaksi bagi daerah lainnya.

Wilayah Pengembangan Utama di Kabupaten Lebak terdiri dari 4 Wilayah Pengembangan sebagai berikut (RTRW Kab. Lebak Tahun 2008-2028):

- a. Wilayah Pengembangan Utama Rangkasbitung, yang meliputi Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Kalanganyar dan Kecamatan Cimarga, dengan pusat - pusat pengembangan terletak di Kota Rangkasbitung.
- b. Wilayah Pengembangan Utama Maja, meliputi Kecamatan Maja, Kecamatan Curugbitung dan Kecamatan Sajira dengan pusat pengembangan terletak di Kota Maja
- c. Wilayah Pengembangan Utama Malingping, meliputi Kecamatan Malingping, dan Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cijaku dengan pusat pengembangan terletak di Kota Malingping.
- d. Wilayah Pengembangan Utama Bayah, meliputi Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilograng dengan pusat pengembangan terletak di Kota Bayah.

Wilayah Pengembangan Penunjang

Wilayah Pengembangan Penunjang berperan sebagai daerah yang mendukung pertumbuhan wilayah utama. Wilayah ini terletak di sebelah Tengah dan Selatan dari Kabupaten Lebak dengan dominasi kegiatan ekonomi sebagai pusat produksi pertanian, peternakan, perikanan, hutan dan pertambangan.

Wilayah Pengembangan Penunjang di Kabupaten Lebak terdiri dari 5 (lima) Wilayah Pengembangan sebagai berikut (RTRW Kab. Lebak Tahun 2008-2028):

- a. Wilayah Pengembangan Penunjang Cibadak, yang meliputi Kecamatan Cibadak, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Cikukur dengan pusat pengembangan berada di Kota Cibadak
- b. Wilayah Pengembangan Penunjang Cipanas, meliputi Kecamatan Cipanas, Kecamatan Sobang, Kecamatan Lebak Gedong dan Kecamatan Muncang dengan

pusat pengembangan berada di Kota Cipanas.

- c. Wilayah Pengembangan Penunjang Leuwidamar, meliputi Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Cirinten dan Kecamatan Bojongmanik dengan pusat pengembangan terletak di Kota Leuwidamar.
- d. Wilayah Pengembangan Penunjang Gunung Kencana, meliputi Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Cileles dengan pusat pengembangan terletak di pusat Kecamatan Gunung Kencana.
- e. Wilayah Pengembangan Penunjang Panggarangan, meliputi Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cigemplong dan Kecamatan Cihara dengan pusat pengembangan terletak di pusat Kecamatan Panggarangan

Strategi perencanaan tata ruang Kabupaten Lebak mengacu pada arahan struktur ruang wilayah nasional, provinsi Banten, pengaruh kawasan pantura Provinsi Banten dan Rencana Strategis Kabupaten Lebak. Arahan pemanfaatan ruang tersebut dituangkan kedalam perencanaan struktur dan pola ruang wilayah.

Untuk mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, maka faktor penunjangnya adalah perbaikan sarana dan prasarana pendukung. Strategi pengembangan pengembangan prasarana Wilayah Kabupaten Lebak adalah meningkatkan dan mempertahankan fungsi prasarana wilayah dalam menunjang pengembangan wilayah, khususnya dalam menunjang pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak. Strategi ini terdiri dari :

- a. Strategi Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi sebagai berikut :
 - Prasarana transportasi yang akan dikembangkan di Kabupaten Lebak adalah Perhubungan darat yang terdiri dari jalan raya dan kereta api serta perhubungan laut yang terdiri dari perhubungan laut khususnya bagi kebutuhan pengembangan perikanan laut.
 - Pengembangan jaringan jalan raya

- yang menghubungkan wilayah utara dan selatan.
- Pengembangan angkutan kereta api untuk angkutan masal dan angkutan barang.
 - Mengembangkan pelabuhan ikan.
- b. Strategi Pengembangan Sistem Prasarana Pengairan sebagai berikut :
- Mengembangkan sistem pengairan yang terdapat di Kabupaten Lebak untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan non pertanian melalui pemanfaatan air permukaan maupun air tanah yang tersebar di Kabupaten Lebak.
- c. Strategi Pengembangan Sistem Prasarana Energi sebagai berikut :
- Mengembangkan potensi energi yang ada untuk memenuhi kebutuhan wilayah utara dan selatan, serta pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi wilayah tengah.
- d. Strategi Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi sebagai berikut :
- Mengembangkan dan mengarahkan Sistem telekomunikasi yang ada dalam menunjang pengembangan hubungan antara wilayah utara dengan wilayah selatan, serta dalam mendukung upaya pengembangan pariwisata.

Dari hasil olahan data menggunakan indeks Geary, analisis visual jumlah penduduk miskin dan kepadatan penduduk miskin, dan gambaran mengenai kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RTRW Kabupaten Lebak maka dapat ditarik beberapa rekomendasi kebijakan dalam usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Lebak.

Wilayah Lebak bagian utara mempunyai tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Kawasan Rangkasbitung menjadi kawasan prioritas utama sebagai pusat administrasi. Dari hasil Semiloka PNPM Perdesaan dan Perkotaan terungkap bahwa tingkat kemiskinan Rangkasbitung lebih dari 40%. Hal ini bisa dikatakan bahwa Kota Rangkasbitung mempunyai daya tarik bagi penduduk yang ada di Kabupaten Lebak untuk

pergi kesana. Selayaknya suatu pusat kegiatan dan administrasi maka permasalahan yang dihadapi akan sangat kompleks. Dengan adanya pergerakan masyarakat (khususnya masyarakat miskin) ke kawasan Rangkasbitung maka tingkat kepadatan penduduk miskin akan menjadi tinggi. Selain itu juga muncul kantong kantong kemiskinan di desa-desa. Kantong-kantong kemiskinan ini harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk segera ditangani.

Banyak program yang sudah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan ini selalu menjadi prioritas program kebijakan pemerintah (RTRW, RPJMD, RPJPD), seminar-seminar, dan program lain yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi tingkat kemiskinan cenderung semakin tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah kurang mampu untuk menjawab masalah kemiskinan ini. Memberlakukan penanganan kemiskinan secara kewilayahan berdasarkan tingkat kemiskinan yang terjadi bisa menjadi salah satu langkah dalam usaha pengentasan kemiskinan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pemetaan analisis spasial pada tahun 2000, 2003, dan 2006 sebaran penduduk miskin dan kepadatan penduduk di Kabupaten Lebak cenderung bersifat mengelompok (*cluster*).
2. Berdasarkan hasil analisis spasial diketahui bahwa program pengentasan kemiskinan yang diambil oleh pemerintah belum menekankan pada strategi penanganan yang bersifat kewilayahan. Sedangkan untuk faktor penyebab kemiskinan sudah menjadi prioritas dari pemerintah Kabupaten Lebak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlinghaus, S.L. 1996. Practical handbook of Spatial Statistics. United States.
CRC. Press. Inc
- Lebak Dalam Angka. 2008. Badan Pusat Statistik Banten.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2008 - 2028.
- RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009 - 2014.
- RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2008 - 2028.
- Rusdiyanto, Arifin dkk. 2007. Pola Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat Antardaerah. Bappenas. Jakarta.